

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pencapaian SDGs 6.1 di Indonesia yaitu “Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua”, masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di wilayah timur seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data nasional, tingkat akses air minum layak di NTT masih berada di bawah rata-rata nasional akibat keterbatasan sumber air, kondisi geologi kering, dan infrastruktur yang belum memadai. Salah satu daerah dengan tingkat kerentanan tinggi adalah Kabupaten Sabu Raijua, di mana ketersediaan air bersih bersifat musiman dan masyarakat sering bergantung pada sumber air tadah hujan atau sumur dangkal. Dalam konteks inilah, intervensi program kemanusiaan seperti Humanity First melalui program *Water for Life* berperan penting untuk mempercepat pencapaian SDGs 6.1 di tingkat lokal melalui penyediaan sarana air bersih dan penguatan kelembagaan masyarakat pengelola air.

Humanity First (HF) menunjukkan peran dominan sebagai pelaksana bantuan pembangunan (*service provider*) yang diperkuat oleh fungsi-fungsi INGO lainnya menurut kerangka Ahmed et al. (2006), dengan hasil temuan penelitian yang konkret dan terukur mengatasi krisis air kronis di Desa Tanajawa dan Halapaji, Kabupaten Sabu Raijua. Secara teknis, HF berhasil membangun sumur bor fungsional yang bertahan lama—berkontras dengan kegagalan sistem sebelumnya yang hanya beroperasi dua bulan pasca-BAST—melalui pemulihan infrastruktur rusak, asesmen sumber air, peningkatan kapasitas penyimpanan, *monitoring-evaluasi* berkelanjutan, penyerahan aset partisipatif kepada masyarakat, serta edukasi konservasi air yang meningkatkan akses air bersih bagi ratusan rumah tangga dan secara signifikan mengurangi beban ekonomi serta sosial akibat perjalanan mencari air hingga puluhan kilometer setiap hari.

Peran strategis Humanity First terhadap SDGs 6.1 berperan signifikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG) 6.1 melalui program *Water for Life* yang bertujuan menyediakan akses air bersih yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Pendekatan yang

digunakan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik infrastruktur air, tetapi juga memperkuat aspek sosial, kelembagaan, dan edukasi masyarakat. Pendekatan ini menjadikan HF sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemenuhan target akses air bersih universal di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergolong daerah krisis air.

Sebagai pelaksana bantuan utama, HF turun langsung memperbaiki kerusakan fisik di Tanajawa (pipa bocor, pompa mati) dan tingkatkan kualitas fasilitas *existing* di Halapaji, menjadikan peran ini sebagai fondasi operasional yang paling menonjol. Fungsi advokasi kebijakan memperkuatnya dengan mendorong pemerintah daerah mengadopsi regulasi *post-project sustainability* di Tanajawa—menegaskan proyek tidak boleh diserahkan tanpa kelembagaan kuat—dan aturan sanitasi embung di Halapaji untuk cegah kontaminasi ternak. Sebagai mediator, HF menghubungkan warga Tanajawa dengan dinas untuk perbaikan infrastruktur dan biaya listrik pompa, serta kelompok Halapaji dengan penyedia teknologi filtrasi dan pendonor, mengatasi jurang komunikasi yang menyebabkan kegagalan program sebelumnya.

HF juga menjalankan pendidikan publik melalui pelatihan perawatan pompa Tanajawa, *monitoring* kualitas air Halapaji, dan meluruskan mitos lokal tentang sumur bor; penguatan partisipasi politik dengan memulihkan *trust* Tanajawa lewat musyawarah tarif/pengelola dan prioritaskan perempuan Halapaji dalam keputusan; fungsi normatif membawa SDG 6.1 sebagai hak asasi ke tingkat desa, ubah paradigma dari proyek fisik sementara menjadi tata kelola berkelanjutan; aktor transnasional via mobilisasi teknologi global untuk air payau Halapaji dan sparepart Tanajawa; serta pemantauan-akuntabilitas dengan audit dana, pelaporan transparan, dan *community-based monitoring* yang membuat pengelolaan Halapaji lebih akuntabel dan Tanajawa menerapkan pengawasan bersama.

Implementasi efektif di Desa Halapaji menunjukkan keberhasilan yang signifikan karena adanya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, dukungan pemerintah desa, dan pengelolaan kelembagaan yang baik. Sebaliknya, di Desa Tanajawa, tantangan teknis seperti gempa bumi dan lemahnya kapasitas kelompok pengelola menyebabkan fasilitas tidak berfungsi optimal. Perbedaan ini

menegaskan bahwa keberhasilan program air bersih berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kesiapan sosial kelembagaan, dukungan pemerintah lokal, ketepatan teknologi sesuai kondisi geologi.

Model kepemilikan fasilitas air bersih oleh kelompok masyarakat terbukti mempercepat layanan dan meningkatkan rasa memiliki, namun menimbulkan risiko keberlanjutan ketika tidak diiringi dengan pencatatan aset secara resmi di pemerintah desa atau dinas teknis. Oleh karena itu, keberlanjutan program sangat bergantung pada sinergi antara komunitas, pemerintah desa, dan pihak eksternal seperti NGO serta lembaga donor. Integrasi kelembagaan formal menjadi prasyarat penting untuk memastikan fasilitas air tetap mendapat perlindungan hukum dan dukungan pembiayaan jangka panjang.

Efektivitas sistem HF dalam memonitoring dan evaluasi mengimplementasikan sistem Monev yang partisipatif dengan melibatkan komunitas pengelola sebagai pelapor utama kondisi fasilitas. Pendekatan ini efektif dalam menjaga akuntabilitas, namun tetap membutuhkan peningkatan kapasitas teknis lokal agar mampu mendeteksi dan menangani kerusakan secara mandiri. Penerapan mekanisme *early warning system* berbasis komunikasi digital seperti grup atau *channel* WhatsApp komunitas terbukti mempercepat respon terhadap gangguan teknis.

Program *Water for Life* memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam penurunan beban kerja perempuan dan anak dalam pengambilan air, pengurangan penyakit akibat air (*waterborne diseases*), serta peningkatan produktivitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, HF berhasil mengubah intervensi kemanusiaan menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian menonjol bahwa HF melengkapi kelemahan upaya pemerintah (distribusi tangki darurat sementara) dengan solusi holistik berbasis 8 fungsi Ahmed—terutama *service provider* dominan—yang transformasi sistemik krisis air bertahun-tahun menjadi akses stabil SDG 6.1, terbukti dari infrastruktur bertahan, kapasitas warga mandiri, dan tata kelola lokal yang berkelanjutan di wilayah 3T.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran INGO Humanity First dalam mengatasi krisis air di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022-2023. Dari penelitian ini, dapat diperoleh informasi mengenai bagaimana peran Humanity First, mulai dari persiapan program, proses berjalannya program, hingga monev untuk memastikan keberlanjutan fasilitas air yang telah dibangun. Informasi ini menggambarkan mengenai kontribusi dan dampak yang diberikan oleh Humanity First kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui program *Water for Life*.

Namun, penelitian ini bukan merupakan penelitian yang sempurna yang masih mengalami keterbatasan informasi yang disebabkan oleh faktor tertentu seperti lokasi yang sulit dijangkau, keterbatasan dana penelitian, dan titik lokasi yang saling berjauhan meskipun masih dalam satu provinsi yang sama. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat memperoleh informasi tambahan, seperti informasi tentang titik bantuan lain yang diberikan oleh Humanity First di Nusa Tenggara Timur sehingga penelitian ini dapat disempurnakan kembali.

6.2.2 Saran Praktis

Penguatan tata kelola aset dan legalitas fasilitas air bersih merupakan langkah strategis yang penting. Infrastruktur air bersih hasil program *Water for Life* sebaiknya dicatat secara formal sebagai bagian dari aset desa atau pemerintah daerah agar memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Proses pencatatan ini dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa atau nota kesepahaman (MoU) antara Humanity First, pemerintah desa, dan kelompok pengelola air, sehingga pengelolaan aset dapat terjamin secara legal dan transparan.

Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan masyarakat juga sangat diperlukan. Pelatihan berkelanjutan bagi kelompok pengelola air perlu dilakukan guna memperkuat kemampuan mereka dalam operasional, pemeliharaan,

pencatatan keuangan, dan manajemen konflik. Penyelenggaraan pelatihan ini hendaknya dilakukan secara periodik dan melibatkan dinas teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta lembaga pendidikan vokasional lokal untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif dan aplikatif.

Untuk menjamin keberlanjutan program, integrasi antara program Humanity First dengan kebijakan pemerintah daerah dan agenda SDGs daerah menjadi sangat krusial. Program *Water for Life* perlu diintegrasikan dengan Rencana Aksi Daerah SDGs serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan demikian, sinergi pendanaan dapat tercipta melalui APBD, Dana Desa, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta yang beroperasi di wilayah tersebut, sehingga program dapat berjalan dengan dukungan dana yang berkelanjutan.

Diversifikasi sumber pembiayaan dan pengembangan skema keberlanjutan juga menjadi fokus utama. Humanity First dapat menginisiasi model kolaboratif dengan lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun program Dana Desa untuk membentuk Dana Cadangan Operasional (O&M Fund). Skema *cost-sharing* antara masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat memperkuat daya tahan fasilitas air bersih terhadap risiko kerusakan besar serta mempercepat respons perbaikan jika terjadi gangguan.

Keberhasilan program di Desa Halapaji dapat dijadikan sebagai model replikasi yang adaptif untuk wilayah lain yang menghadapi krisis air, terutama di daerah dengan kondisi iklim semi-arid serupa seperti NTB dan sebagian wilayah Maluku. Replikasi ini perlu disesuaikan dengan desain teknis setempat, penguatan kelembagaan lokal, serta kolaborasi multipihak agar dampak positif dari program dapat diperluas secara efektif dan berkelanjutan.